

Representasi Etika Profesional dalam Laporan Keuangan: Analisis Naratif dan Wacana dalam Praktik Akuntansi di Sektor Publik

Sukma Perdana¹, Etty Umamy²

^{1,2} Universitas Wisnuwardhana, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Sukma Perdana

E-mail: sukmapublikasi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi representasi etika profesional dan strategi wacana yang digunakan dalam narasi laporan keuangan sektor publik, khususnya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Sampel data berupa dokumen LKjIP dan LKPD tahun 2021–2022 dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi isi dan aksesibilitas publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Variabel penelitian meliputi representasi etika profesional, struktur narasi, dan diksi yang digunakan dalam laporan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan kategorisasi elemen linguistik, identifikasi pola representasi aktor dan tanggung jawab, serta interpretasi berdasarkan kerangka teori wacana dan etika profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi laporan cenderung menonjolkan keberhasilan melalui penggunaan diksi positif, sementara kegagalan disampaikan secara pasif dan impersonal, yang berpotensi menyamarkan tanggung jawab institusional. Strategi penghindaran tanggung jawab umumnya disampaikan melalui rujukan terhadap faktor eksternal seperti kendala anggaran atau regulasi pusat. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara prinsip etika profesional dan praktik naratif yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman naratif yang tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menjamin integritas dan akuntabilitas dalam komunikasi publik. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan etika dan komunikasi naratif bagi penyusun laporan keuangan sektor publik serta membuka peluang studi lanjutan berbasis korpus digital atau lintas wilayah.

Kata kunci - etika professional, laporan keuangan public, strategi wacana, akuntabilitas, analisis naratif.

Abstract

This study aims to identify the representation of professional ethics and discourse strategies used in the narrative of public sector financial reports, particularly in the Performance Accountability Reports of Government Agencies (LKjIP) and the Local Government Financial Reports (LKPD) of Malang City. The research adopts a qualitative approach using critical discourse analysis. The data samples consist of the 2021–2022 LKjIP and LKPD documents, selected purposively based on content relevance and public accessibility. Data collection was conducted through documentation and literature study. The research variables include the representation of professional ethics, narrative structure, and diction used in the reports. Data analysis involved categorizing linguistic elements, identifying patterns in actor representation and responsibility, and interpreting findings based on discourse theory and professional ethics frameworks. The results indicate that report narratives tend to emphasize success through affirmative diction, while failures are described passively and impersonally, potentially obscuring institutional responsibility. Strategies to evade accountability are often framed by referring to external factors such as budget constraints or central government regulations. These findings reveal a gap between the ideals of professional ethics and the narrative practices in use. Therefore, there is a need for narrative guidelines that not only fulfill administrative standards but also uphold integrity and accountability in public communication. The study recommends ethics and narrative communication training for public sector financial report authors and opens avenues for further research using digital corpora or cross-regional comparisons.

Keywords - professional ethics, public financial reporting, discourse strategy, accountability, narrative analysis.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan instrumen fundamental dalam proses komunikasi informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks entitas sektor publik, keberadaan laporan keuangan tidak hanya menjadi alat untuk menunjukkan posisi dan kinerja fiskal secara numerik, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif atas pengelolaan dana publik. Laporan tersebut mencerminkan sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan oleh institusi pemerintah dalam menjalankan fungsinya (Agustina & Puspita, 2019). Karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat, maka praktik akuntansi di sektor publik menuntut integritas dan profesionalisme yang tinggi agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah tetap terjaga.

Penyusunan laporan keuangan tidak sepenuhnya bersifat kuantitatif. Bagian-bagian tertentu dalam laporan, seperti *Management Discussion and Analysis* (MD&A), ikhtisar kinerja, atau *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKjIP), mengandung narasi yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Dalam bagian-bagian ini, bahasa memainkan peran penting sebagai medium yang menyampaikan, membingkai, dan terkadang menegosiasikan makna dari data keuangan yang tersaji. Oleh karena itu, laporan keuangan juga merupakan produk linguistik yang tidak bebas dari subjektivitas. Bahasa yang digunakan dapat memperkuat nilai-nilai etis atau, sebaliknya, menyamarkan fakta dan realitas keuangan melalui strategi wacana tertentu (Burke et al., 2016).

Fenomena penggunaan bahasa dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa penyampaian informasi keuangan tidaklah netral. Pilihan kata, struktur kalimat, serta gaya naratif dapat memengaruhi cara pembaca memahami dan menafsirkan informasi yang disajikan. Narasi yang tampak objektif dapat saja mengandung unsur manipulatif yang tersembunyi, seperti eufemisme atau pengalihan fokus, yang secara tidak langsung menutupi kinerja buruk atau kesalahan pengelolaan. Strategi semacam ini dapat menciptakan ilusi etika, yaitu situasi di mana laporan tampak etis secara bentuk, tetapi menyimpang secara substansi (Beattie, 2014; Rahmayanti & Mulyani, 2021).

Dalam praktiknya, etika profesional dalam akuntansi mencakup sejumlah prinsip mendasar, yakni integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional yang sesuai dengan standar (IFAC, 2018). Prinsip-prinsip ini semestinya tercermin tidak hanya dalam proses pencatatan dan penyajian angka, tetapi juga dalam penyusunan narasi dan penjelasan dalam laporan keuangan. Namun, dalam banyak kasus, prinsip tersebut tidak secara eksplisit terepresentasikan dalam bahasa laporan. Bahkan, terdapat kecenderungan penggunaan bahasa sebagai alat persuasi atau bahkan justifikasi yang dapat mengaburkan pelanggaran prinsip etika (Rutherford, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat pentingnya dimensi linguistik dalam konteks akuntansi. Misalnya, Beattie et al. (2013) menunjukkan bahwa narasi dalam laporan keuangan sering digunakan untuk menutupi informasi negatif atau menekankan aspek positif secara berlebihan. Demir (2015) juga mengidentifikasi praktik *impression management* dalam laporan tahunan perusahaan di Turki yang dilakukan melalui manipulasi bahasa. Di Indonesia, Saputra dan Herawati (2020) mencatat adanya penggunaan bahasa eufemistik dalam *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* yang berpotensi menyesatkan pembaca awam. Namun demikian, kajian yang secara eksplisit memadukan perspektif etika profesional akuntansi dengan pendekatan linguistik kritis, khususnya dalam konteks laporan keuangan sektor publik di Indonesia, masih sangat terbatas.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan pada pertanyaan utama: *Bagaimana etika profesional direpresentasikan secara naratif dan linguistik dalam laporan keuangan sektor publik?* Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana nilai-nilai etika profesional diartikulasikan, disiratkan, atau justru disamarkan melalui konstruksi bahasa dalam teks laporan keuangan, dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis.

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya untuk membongkar dimensi tersembunyi dalam pelaporan keuangan yang selama ini kurang mendapat perhatian, yakni dimensi naratif dan wacana. Dengan memadukan perspektif akuntansi dan ilmu bahasa, khususnya analisis naratif dan analisis wacana kritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan interdisipliner yang dapat memperkuat transparansi dan etika dalam praktik akuntansi sektor publik. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pedoman penyusunan laporan keuangan yang lebih etis dan komunikatif.

Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis dokumen *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* di Indonesia yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Fokus utama terletak pada bagian naratif laporan, seperti kata pengantar kepala daerah, ringkasan eksekutif, serta *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKjIP). Penelitian ini tidak mengevaluasi aspek numerik atau teknis dari laporan keuangan, melainkan memusatkan perhatian pada representasi nilai etika profesional dalam bahasa dan struktur naratif laporan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Perspektif Akuntansi: Etika, Profesionalisme, dan Pelaporan di Sektor Publik

Etika dan profesionalisme merupakan fondasi penting dalam praktik akuntansi, terutama di sektor publik yang mengelola sumber daya masyarakat. Kode etik akuntan profesional yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC, 2018) menegaskan bahwa integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional merupakan prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam seluruh aktivitas pelaporan keuangan.

Dalam konteks sektor publik, etika profesional tidak hanya menjadi norma perilaku, tetapi juga menjadi mekanisme pengendali terhadap praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pelaporan keuangan publik harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Yulianingsih & Purwanto, 2021). Transparansi menuntut keterbukaan informasi, akuntabilitas mengharuskan adanya kejelasan pertanggungjawaban, dan kejujuran menuntut kesesuaian antara apa yang dilaporkan dan kondisi riil.

Standar akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengatur format dan isi laporan keuangan, termasuk penyajian laporan yang bersifat naratif, seperti *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKjIP), *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (LPPD), dan *Laporan Realisasi Anggaran* (LRA). Dokumen-dokumen ini tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menyampaikan uraian tentang capaian kinerja, kendala pelaksanaan, serta strategi ke depan. Oleh karena itu, narasi dalam laporan ini memiliki implikasi penting terhadap persepsi publik tentang integritas dan etika institusi pengelola keuangan negara (Kementerian PANRB, 2020).

Perspektif Bahasa dan Sastra: Analisis Naratif dan Wacana Kritis

Dalam kajian linguistik kritis, bahasa tidak dipandang sebagai sarana komunikasi netral, melainkan sebagai instrumen ideologis yang dapat membentuk realitas sosial. Teori analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Fairclough (2013) dan van Dijk (2015) memandang bahwa teks selalu mengandung konstruksi kekuasaan, nilai, dan ideologi tertentu. Dalam konteks pelaporan keuangan, hal ini berarti bahwa narasi dalam laporan keuangan bukan sekadar penyampaian fakta, tetapi juga bentuk representasi atas tanggung jawab, keberhasilan, atau kegagalan yang dikonstruksi secara linguistik.

Analisis naratif, menurut Riessman (2008), dapat digunakan untuk memahami struktur cerita, tokoh, dan alur dalam teks yang bertujuan mempengaruhi pembaca. Narasi dapat menyusun kembali peristiwa keuangan secara selektif dan strategis untuk membingkai makna yang dikehendaki. Dalam laporan keuangan sektor publik, pilihan kata dan struktur kalimat dapat digunakan untuk menonjolkan keberhasilan atau mengaburkan kegagalan. Representasi ideologi dalam teks naratif

semacam ini dapat berimplikasi pada cara publik menilai etika, tanggung jawab, dan akuntabilitas institusi (Rutherford, 2016).

Bahasa memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik terhadap integritas lembaga. Strategi linguistik seperti eufemisme, penghindaran subjek, atau penyusunan narasi dalam bentuk pasif dapat digunakan sebagai bentuk *impression management* yang mengarah pada manipulasi etis secara halus (Beattie, 2014). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji narasi dalam laporan keuangan dari perspektif linguistik kritis guna memahami potensi penyimpangan makna dan nilai etika yang tersembunyi.

Tinjauan Empiris: Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti relasi antara etika, bahasa, dan pelaporan keuangan. Beattie et al. (2013) menemukan bahwa perusahaan kerap menggunakan narasi untuk menutupi informasi negatif dalam laporan keuangannya. Penelitian oleh Demir (2015) di Turki juga menunjukkan praktik manipulasi narasi dalam laporan tahunan melalui strategi wacana untuk menciptakan citra positif perusahaan.

Di Indonesia, Saputra dan Herawati (2020) mengidentifikasi adanya penggunaan bahasa yang bersifat eufemistik dan ambigu dalam *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sementara itu, Rahmayanti dan Mulyani (2021) menegaskan bahwa strategi bahasa dalam laporan keuangan BUMD kerap digunakan untuk membingkai kinerja agar tampak sesuai dengan prinsip akuntabilitas, meskipun secara substansi masih menyimpan kelemahan. Kajian-kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan akuntansi dan linguistik dalam menganalisis narasi pelaporan keuangan.

Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tinjauan teoritis dan empiris di atas, penelitian ini mengembangkan kerangka konsep yang memadukan prinsip-prinsip etika profesional dalam akuntansi dengan pendekatan analisis naratif dan wacana kritis dalam linguistik. Etika profesional dioperasionalkan sebagai seperangkat nilai yang seharusnya tercermin dalam pelaporan keuangan, sementara bahasa diposisikan sebagai alat representasi nilai tersebut. Analisis diarahkan pada teks naratif laporan keuangan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dimunculkan atau disamarkan dalam struktur dan pilihan bahasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner yang memadukan perspektif ilmu akuntansi dengan analisis linguistik, khususnya analisis naratif dan wacana kritis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam representasi nilai-nilai etika profesional dalam teks laporan keuangan sektor publik, tidak hanya dari sisi isi substansi akuntansi, tetapi juga dari cara penyajiannya melalui bahasa.

Data dalam penelitian ini berupa dokumen laporan keuangan sektor publik dari Kota Malang, khususnya yang memuat unsur naratif atau deskriptif mengenai pelaksanaan program dan capaian kinerja instansi pemerintah daerah. Dokumen yang dianalisis antara lain: *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* Pemerintah Kota Malang tahun 2021–2023, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)* Kota Malang tahun 2021–2023, dan Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Malang (jika tersedia dan dapat diakses publik). Pemilihan Kota Malang didasarkan pada pertimbangan ketersediaan dokumen yang terbuka untuk publik, stabilitas tata kelola pemerintahan, dan dinamika diskursus publik yang cukup aktif mengenai transparansi serta akuntabilitas anggaran daerah. Dokumen-dokumen tersebut diunduh melalui situs resmi Pemerintah Kota Malang dan instansi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen yang melibatkan identifikasi, pemilihan, dan pengkajian isi laporan keuangan yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti

untuk menelaah bentuk representasi etika profesional yang tertuang secara implisit maupun eksplisit dalam teks naratif laporan keuangan. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis laporan dan unit institusionalnya, kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teknik interpretatif (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu Pemaknaan Etika melalui Kode Etik Akuntansi, Analisis, dan Analisis Wacana Kritis. Pada tahap awal, dilakukan pemetaan terhadap prinsip-prinsip etika profesional akuntansi berdasarkan kode etik yang dirujuk oleh International Federation of Accountants (IFAC, 2018), meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Setiap prinsip dikembangkan menjadi indikator analisis untuk mengidentifikasi apakah dan bagaimana nilai-nilai tersebut direpresentasikan dalam teks laporan keuangan.

Tahap kedua menggunakan pendekatan analisis naratif untuk mengkaji struktur cerita, penempatan aktor institusional, serta bentuk-bentuk penghindaran atau pelimpahan tanggung jawab dalam narasi. Teknik ini mengikuti kerangka Riessman (2008) yang menelusuri bagaimana struktur naratif digunakan untuk membingkai peristiwa dan membangun citra institusi.

Tahap ketiga menerapkan analisis wacana kritis berdasarkan model Fairclough (2013) dan van Dijk (2015) untuk mengidentifikasi pilihan kata, penggunaan metafora, struktur kalimat, dan strategi retorik yang digunakan untuk menegaskan atau menyamarkan nilai-nilai etika profesional. Analisis ini membantu mengungkap dimensi ideologis dan strategi komunikasi yang tersembunyi dalam teks laporan keuangan.

Seluruh tahapan analisis dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan konteks institusi dan lingkungan sosial-politik tempat laporan tersebut disusun. Validitas hasil dianalisis melalui triangulasi sumber dan peer debriefing antar peneliti dari dua bidang keilmuan yang berbeda (akuntansi dan linguistik), guna menjaga konsistensi interpretasi dan mengurangi bias subjektif.

PEMBAHASAN

Representasi Etika Profesional dalam Narasi Laporan

Hasil penelitian terhadap dokumen *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* dan *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)* Kota Malang tahun anggaran 2021 dan 2022 mengungkapkan adanya pola naratif yang merepresentasikan strategi selektif dalam menampilkan etika profesional. Temuan ini diperoleh melalui proses analisis mendalam yang didukung oleh triangulasi sumber, mencakup data dari dokumen resmi, literatur pendukung, serta konfirmasi lintas referensi. Validitas hasil juga diperkuat melalui peer debriefing antar peneliti dari dua latar belakang keilmuan yang berbeda, yaitu akuntansi dan linguistik. Kolaborasi interdisipliner ini memungkinkan pengujian makna secara lebih menyeluruh—baik dari sisi kepatuhan terhadap prinsip etika akuntansi, maupun dari aspek kebahasaan yang digunakan dalam membingkai informasi kinerja keuangan. Pendekatan ini memastikan bahwa interpretasi terhadap strategi naratif yang ditemukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga substansial dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesional lembaga publik.

Analisis terhadap bagian naratif dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan lebih banyak disampaikan dalam bentuk aktif dengan penggunaan kata ganti kolektif seperti “kami”, “pemerintah daerah”, “unit kerja”, sedangkan ketidaktercapaian atau kegagalan cenderung dikemas dalam bentuk pasif dan impersonal. Misalnya, dalam LKjIP Kota Malang Tahun 2022, pada bagian “Evaluasi Capaian Kinerja”, keberhasilan disampaikan sebagai berikut:

“Kami berhasil meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui sistem informasi terpadu dan digitalisasi layanan administrasi.”

Namun, pada bagian yang sama, untuk program yang tidak mencapai target, pernyataan naratif berubah menjadi bentuk pasif:

“Target belum tercapai secara optimal karena terdapat kendala teknis dan keterbatasan koordinasi antarsektor.”

Penggunaan struktur pasif seperti “belum tercapai” dan ketiadaan subjek eksplisit dalam narasi kegagalan menunjukkan penghindaran atribusi tanggung jawab yang jelas. Strategi ini berpotensi menutupi akuntabilitas institusi atas kinerja yang tidak optimal. Hal ini selaras dengan penelitian Beattie et al. (2013), yang mengungkap bahwa laporan keuangan cenderung menggunakan bentuk bahasa pasif dan eufemistik ketika menyampaikan informasi negatif guna menjaga citra organisasi.

Untuk memberikan gambaran kuantitatif, berikut adalah rekapitulasi frekuensi penggunaan struktur naratif berdasarkan bentuk aktif dan pasif dalam 20 paragraf naratif utama dari dua dokumen tersebut:

Tabel 1.

Pola Penggunaan Struktur Kalimat dalam Narasi Laporan Keuangan Kota Malang

Jenis Struktur Kalimat	Frekuensi dalam Narasi Keberhasilan	Frekuensi dalam Narasi Kegagalan
Kalimat Aktif (dengan subjek eksplisit seperti “kami”, “unit”)	18	4
Kalimat Pasif/Impersonal (tanpa subjek atau menggunakan bentuk netral)	2	16

Dari tabel di atas terlihat bahwa keberhasilan lebih dominan disampaikan dalam bentuk aktif dengan pengakuan peran institusi, sedangkan kegagalan cenderung dikonstruksi dalam bentuk pasif tanpa kejelasan pelaku. Strategi ini mengaburkan identifikasi tanggung jawab, yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dalam etika profesional akuntansi sektor publik (Agustina & Puspita, 2019; IFAC, 2018).

Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi bukan sekadar medium netral, melainkan alat representasi ideologis yang dapat digunakan untuk mempertahankan citra positif organisasi. Padahal, dalam kerangka etika profesi akuntansi, penyampaian informasi—baik keberhasilan maupun kegagalan—harus dilakukan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Yusuf & Hermawan, 2021).

Jika narasi kegagalan tidak menyertakan identifikasi subjek atau unit kerja yang bertanggung jawab, maka publik tidak mendapatkan gambaran yang utuh tentang siapa yang harus melakukan perbaikan. Akibatnya, evaluasi kinerja dapat menjadi bias, dan potensi perbaikan institusional terhambat.

Strategi Wacana dan Bahasa dalam Laporan Keuangan

Analisis terhadap dokumen *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah* (LKjIP) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2021 dan 2022 mengindikasikan adanya penggunaan strategi wacana linguistik yang konsisten dalam membingkai narasi kinerja secara afirmatif, meskipun capaian aktual belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Proses analisis ini diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yang mencakup perbandingan lintas dokumen serta literatur pendukung terkait etika pelaporan dan teori wacana kritis. Validitas interpretasi turut dijaga melalui peer debriefing antar peneliti dari dua bidang keilmuan yang berbeda, yakni akuntansi dan linguistik, untuk memastikan bahwa pembacaan terhadap narasi tidak hanya dilihat dari sisi kebahasaan, tetapi juga dalam kerangka akuntabilitas dan etika profesional. Kolaborasi interdisipliner ini memungkinkan eksplorasi yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara bentuk bahasa, strategi representasi institusional, dan implikasi etis dalam praktik pelaporan kinerja sektor publik.

Pemilihan diksi dalam narasi keuangan menunjukkan kecenderungan untuk membentuk citra institusional yang positif, bahkan ketika pencapaian kinerja tidak sepenuhnya memenuhi target indikator yang ditetapkan. Salah satu temuan utama adalah penggunaan kata-kata bernuansa

optimistik seperti “optimal”, “maksimal”, “berkontribusi signifikan”, atau “meningkatkan efektivitas”, yang sering kali tidak disertai dengan data kuantitatif yang mendukung pernyataan tersebut. Sebagai contoh, dalam LKjIP Kota Malang 2022, tercantum pernyataan berikut:

“Pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal meskipun belum seluruh target dapat dicapai akibat kendala teknis dan dinamika sosial.”

Frasa “berjalan optimal” secara semantik menunjukkan keberhasilan, namun dikuti oleh klausa yang menyiratkan ketidaktercapaian target. Hal ini merupakan bentuk strategi framing linguistik yang mengarahkan persepsi pembaca kepada kesan positif, meskipun secara substansi terjadi deviasi kinerja. Temuan ini mendukung argumentasi Beattie et al. (2013) mengenai penggunaan retorika eufemistis dalam pelaporan keuangan untuk mempertahankan citra organisasi.

Lebih lanjut, strategi penghindaran tanggung jawab dalam wacana juga diidentifikasi melalui penyandaran pada faktor eksternal. Berikut adalah kutipan representatif dari dokumen yang dianalisis:

“Belum tercapainya target program disebabkan oleh keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.”

“Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kelancaran realisasi kegiatan fisik di beberapa sektor.”

“Terdapat perubahan regulasi yang memengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.”

Ketiga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyebab kegagalan dikaitkan dengan faktor eksternal tanpa disertai evaluasi terhadap kapasitas internal, manajemen risiko, atau pengambilan keputusan administratif. Strategi seperti ini merupakan bentuk wacana pembingkai eksternalitas (*external attribution*), yang menurut van Dijk (2015), bertujuan untuk melindungi citra kelompok sendiri (*ingroup*) dan mengalihkan tanggung jawab dari aktor utama.

Untuk memperjelas kecenderungan ini, berikut disajikan hasil rekapitulasi frekuensi penggunaan diksi afirmatif dan strategi penghindaran tanggung jawab berdasarkan analisis terhadap 10 paragraf utama dalam masing-masing dokumen LKjIP tahun 2021 dan 2022.

Tabel 2.

Pola Strategi Bahasa dalam Narasi Laporan Keuangan Kota Malang

Strategi Bahasa	Jumlah Kemunculan (LKjIP 2021)	Jumlah Kemunculan (LKjIP 2022)	Total
Diksi afirmatif (optimal, maksimal, signifikan)	13	16	29
Framing keberhasilan dengan disertai kegagalan	7	9	16
Atribusi eksternal atas kegagalan	6	8	14
Evaluasi internal secara eksplisit	1	2	3

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa strategi afirmatif dan atribusi eksternal dominan digunakan dalam kedua dokumen. Hanya sedikit bagian naratif yang menunjukkan evaluasi internal secara eksplisit, yang berarti adanya potensi pengaburan nilai etika seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam penyampaian informasi kinerja.

Ketidaksesuaian antara narasi positif dan capaian indikator kinerja ini menandai adanya disonansi etis yang signifikan. Padahal, menurut prinsip-prinsip Kode Etik Akuntansi IFAC (2018), laporan keuangan—termasuk bagian naratif—harus memenuhi unsur integritas, objektivitas, dan transparansi, tanpa manipulasi persepsi melalui konstruksi wacana yang menyesatkan.

Selain itu, Yusuf dan Hermawan (2021) menekankan bahwa penggunaan bahasa dalam pelaporan sektor publik harus mencerminkan akuntabilitas, bukan sekadar keluwesan retorika. Bila praktik linguistik lebih mengutamakan penyesuaian citra ketimbang pelaporan substantif, maka akuntabilitas publik berisiko terdegradasi secara sistemik.

Implikasi Temuan

Temuan ini mengungkap adanya ketegangan yang signifikan antara ideal etika profesional dan praktik naratif aktual dalam pelaporan keuangan sektor publik. Bahasa dalam laporan keuangan tidak semata-mata berfungsi sebagai media penyampaian data, melainkan juga sebagai sarana pembingkai realitas dan legitimasi institusional. Hasil telaah terhadap LKJIP dan LKPD Kota Malang tahun 2021–2022 menunjukkan adanya pola-pola penyusunan narasi yang secara halus menghindari atribusi tanggung jawab langsung atas kegagalan program. Sebagai contoh, frasa seperti *“terdapat kendala teknis yang menghambat capaian”* atau *“program belum dapat direalisasikan secara optimal”* digunakan untuk menyamarkan kegagalan struktural tanpa menyebut unit kerja terkait.

Strategi linguistik semacam ini menimbulkan risiko penyimpangan etis, karena mengaburkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam laporan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterampilan bahasa dan kesadaran etis memiliki peran strategis dalam pengelolaan persepsi publik terhadap kinerja institusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi komunikasi dan integritas profesional pelaku akuntansi di sektor publik. Rekomendasi ini sejalan dengan hasil studi Perdana dkk. (2025), yang menekankan pentingnya pelatihan keterampilan komunikasi naratif dan pemahaman etika dalam memperkuat profesionalitas Kantor Jasa Akuntansi (KJA) di Kota Malang. Upaya ini perlu dijadikan bagian dari reformasi pelaporan keuangan, bukan sekadar untuk memenuhi standar administratif, tetapi untuk memastikan bahwa pesan-pesan dalam laporan mencerminkan kondisi nyata secara jujur dan bertanggung jawab.

Hasil analisis naratif terhadap LKJIP dan LKPD Pemerintah Kota Malang tahun 2021–2022 mengindikasikan bahwa struktur bahasa yang dipilih cenderung memfokuskan pada penguatan citra positif institusi (*positive self-presentation*) dan secara sistematis menghindari atribusi tanggung jawab terhadap capaian yang tidak optimal. Praktik ini tidak hanya menyamarkan ketidaktercapaian indikator kinerja, tetapi juga secara implisit dapat mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari etika profesional akuntansi publik.

Secara empirik, ketika narasi keberhasilan ditulis dengan intensitas 3 kali lebih banyak daripada narasi kegagalan, dan hanya 21,4% dari deskripsi ketidaktercapaian yang memuat unsur evaluasi internal, maka potensi penyimpangan etis melalui wacana menjadi signifikan. Representasi ini tidak lagi bersifat netral, melainkan selektif dan strategis, seperti ditunjukkan dalam hasil berikut:

Tabel 3.
Proporsi Narasi Berdasarkan Kategori Representasi

Jenis Narasi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Narasi keberhasilan	28	58,3%
Narasi ketidaktercapaian	20	41,7%
- Dengan evaluasi internal	6	21,4% dari ketidaktercapaian
- Dengan atribusi eksternal	14	78,6% dari ketidaktercapaian

Proporsi ini menunjukkan bahwa narasi kegagalan lebih sering dikaitkan dengan faktor eksternal (seperti keterbatasan anggaran, regulasi pusat, atau kondisi pandemi) dan jarang disertai refleksi institusional. Fenomena ini mendukung hipotesis van Dijk (2015) bahwa teks institusional dalam sektor publik sering kali digunakan sebagai alat penguatan citra kelompok (*ingroup favoritism*) daripada sebagai sarana pelaporan objektif.

Implikasi dari praktik ini bersifat multidimensi. Di satu sisi, penyusunan laporan yang retorik dapat menurunkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data karena menyembunyikan kegagalan menghambat perbaikan sistemik. Di sisi lain, secara etis, narasi yang menyesatkan atau tidak proporsional dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga

pemerintahan. Bila tidak dikoreksi, hal ini akan memperlemah struktur akuntabilitas demokratis di tingkat lokal.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, diperlukan suatu kerangka normatif dan kebijakan teknis yang tidak hanya mengatur aspek teknis pelaporan (*compliance-based reporting*), tetapi juga aspek substantif narasi (*principle-based reporting*). Pendekatan ini menekankan bahwa narasi laporan bukan hanya dokumen administratif, melainkan cerminan moral dan integritas kelembagaan.

Untuk memperjelas integrasi antara bahasa, etika, dan pelaporan publik, berikut disajikan model konseptual berdasarkan hasil penelitian ini:



Gambar 1.

Model Ketegangan Etika dalam Narasi Laporan Keuangan Sektor Publik

Model ini menunjukkan bahwa ketika strategi bahasa lebih diarahkan untuk mempertahankan citra institusi daripada mencerminkan fakta, maka fungsi etika profesional mengalami disonansi. Oleh karena itu, langkah korektif sangat dibutuhkan, seperti:

1. Penyusunan pedoman naratif dalam laporan keuangan yang menjamin keseimbangan antara keberhasilan dan kegagalan secara proporsional, serta mewajibkan evaluasi internal terhadap ketidaktercapaian.
2. Pelatihan etika pelaporan bagi penyusun laporan keuangan instansi daerah yang tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang integritas bahasa dalam laporan publik.
3. Audit naratif (*narrative auditing*) sebagai bagian dari proses review dokumen publik, untuk menilai koherensi antara isi narasi dengan data kinerja faktual.

Rekomendasi ini sejalan dengan seruan IFAC (2020), yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan tidak hanya berbicara dalam angka, tetapi juga dalam kata, dan oleh karena itu, harus tunduk pada prinsip etis yang ketat. Hanya dengan pelaporan yang jujur dan reflektif, kepercayaan publik terhadap institusi sektor publik dapat dijaga dan diperkuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik penyusunan laporan keuangan sektor publik di Kota Malang tidak hanya dipengaruhi oleh kaidah teknis akuntansi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi wacana yang berorientasi pada pembentukan citra institusional. Melalui analisis naratif dan wacana kritis terhadap laporan LKPD dan LKjIP tahun 2021–2022, ditemukan bahwa penggunaan diksi afirmatif, atribusi eksternal atas kegagalan, serta minimnya evaluasi internal mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip etika profesional—seperti

transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran—dengan realitas representasi teks. Bahasa terbukti berperan sebagai instrumen ideologis yang dapat memperkuat legitimasi, namun berpotensi menyamakan kegagalan dan melemahkan akuntabilitas publik. Temuan ini menjawab tujuan penelitian, yakni mengungkap bagaimana narasi dalam laporan keuangan dapat menjadi ruang kontestasi etika dan kepentingan kelembagaan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong reformulasi pedoman pelaporan publik yang memperhatikan integritas bahasa secara substantif, bukan hanya aspek administratif. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan, terutama yang mengeksplorasi pengaruh gaya bahasa terhadap persepsi publik atau membandingkan praktik pelaporan naratif di daerah lain guna memperluas pemahaman mengenai etika komunikasi dalam tata kelola keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., & Puspita, R. (2019). Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 44–59. <https://doi.org/10.21002/jaki.v16i1.1039>
- Beattie, V. (2014). Accounting narratives and the narrative turn in accounting research: Issues, theory, methodology, methods and a research framework. *The British Accounting Review*, 46(2), 111–134. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.05.001>
- Beattie, V., McInnes, B., & Fearnley, S. (2013). Narrative reporting by UK listed companies: A longitudinal perspective. *Accounting and Business Research*, 43(3), 243–279. <https://doi.org/10.1080/00014788.2012.711131>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027>
- Burke, J. J., Clark, C. E., & Koopman, M. (2016). A linguistic analysis of MD&A narratives: Detecting financial misreporting. *Journal of Business Ethics*, 139(3), 535–548. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2672-0>
- Demir, V. (2015). Impression management in annual reports: A case study from Turkey. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 34–58.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- IFAC (International Federation of Accountants). (2018). *Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants*. <https://www.ifac.org>
- IFAC. (2020). *Enhancing corporate reporting: The way forward*. <https://www.ifac.org>
- Kementerian PANRB. (2020). *Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*. <https://www.menpan.go.id>
- Perdana, S., Umamy, E., Efendiy, K., Kristiawan, I., & Siwi Suwigyo, H. L. (2025). Penguatan profesionalitas KJA di Kota Malang melalui pelatihan keterampilan komunikasi dan pemahaman etika. *ABIDUMASY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(01), 37–44. <https://doi.org/10.33752/abidumasy.v6i01.8804>
- Rahmayanti, N., & Mulyani, S. (2021). Analisis wacana kritis pada laporan tahunan: Studi kasus pada BUMD. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 351–370. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.08.12035>
- Riessman, C. K. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. Sage Publications.
- Rutherford, B. A. (2016). A new paradigm for narrative accounting disclosure: Building a framework for empirical research. *Accounting Forum*, 40(3), 190–205. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.04.003>
- Saputra, A. R., & Herawati, N. (2020). Analisis wacana dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi kasus Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(1), 45–57.
- Van Dijk, T. A. (2015). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.

Yulianingsih, R., & Purwanto, B. (2021). Etika akuntansi dan transparansi *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 23–35.

Yusuf, A., & Hermawan, A. (2021). Peran etika dalam pelaporan keuangan sektor publik: Tinjauan normatif. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 110–123.

<https://doi.org/10.24843/JAKP.2021.v12.i02.p3>